BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur diperlukan adanya pelaksanaan pembangunan di segala bidang baik materiil maupun spirituil. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan yang baik yang dapat mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan segenap rencana pembangunan berdasarkan data yang riil dari suatu penelitian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kewenangan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah kabupaten atau kota. Hal ini berarti bahwa daerah kabupaten atau kota diberi kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan melakukan evaluasi sendiri atas seluruh program pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada diri seorang kepada wilayah atau daerah sebagai kepala daerah, dan di pihak lain ia berfungsi sebagai kepala wilayah dalam hal ini merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Kepala wilayah adalah penguasa di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya selalu berdasarkan kepada perencanaan keuangan tahunan, yakni Anggaran Pengapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dijelaskan bahwa APBD adalah suatu hal yang sangat penting, karena :

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
4. Merupakan saran untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu.

APBD berfungsi untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek. APBD berfungsi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mencari dana (pendapatan) dan ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya membelanjakan dana (Ibnu Syamsi, 1998:205).

Pada sisi penerimaan atau kegiatan yang sifatnya mencari dana (pendapatan), terdapat pos sumbangan (bantuan) dari pusat, bagian dari hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman daerah. Namun yang menggambarkan secara tepat kemampuan pemerintah dalam menggali dana-dana dari masyarakat adalah pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, sebab angka yang tercantum dalam pos ini menunjukkan sejumlah uang atau pendapatan yang berhasil dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah sendiri yang secara keseluruhan berasal dari sumber-sumber daerahnya sendiri.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan mIlik Daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebenarnya memang sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonominya. Untuk itu perlu diadakan penelitian terhadap setiap macam Pendapatan Asli Daerah.

Penyelenggaraan Otoda yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam suatu

pemerintah daerah. Peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah hendaknya mampu mengelola seefektif mungkin sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan memberi pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta memberi kekuasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber UU No. 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan melalui penyediaan fasilitas dan menetapkan target sesuai dengan potensi melalui kegiatan investasi ang memiliki peranan yang sangat strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal itu harus dilalukan secara professional melalui mekanisme dan prosedur yang baik dan transparan guna menghindari terjadinya pemborosan biaya pemungutan dan kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian di atas untuk peneliti berkeinginan untuk melalukan penelitian dengan judul : “Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Malang.”

B. Permasalahan

Setelah melakukan penelitian pendahuluan dan mengkaji awal tentang Pendapatan Asli Daerah khususnya di Daerah Tingkat II Kota Malang maka dapat dikemukakan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Pendapaan Asli Daerah Kabupaten Malang tahun 1994 sampai dengan 2005 ?
2. Apakah ada perbedaan perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang sebelum dan sesudah Otonomi Daerah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tahun 1994 sampai dengan 2005.
2. Untuk menganalisis perbedaan perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang sebelum dan sesudah Otonomi Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan masukan mengenai keadaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten Malang sehingga dapat bermanfaat bagi usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten Malang Jawa Timur.
2. Sebagai bahan perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya tentang perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten Malang Jawa Timur.